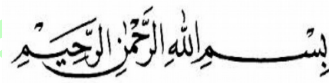




PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Ek. tanggal 12 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1981 di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 7 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
4. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 bulan dengan hubungan sudah begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan karena pernah

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Ek



melakukan hubungan badan, sehingga untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-339/Kua.21.05.02/Pw.01/11/2018, tanggal 12 Nopember 2018;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih berat jika anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** jika tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Pemohon dan orang tua **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Ek



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya tersebut mengingat anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum cukup umur, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini sudah putus sekolah;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap untuk berumah tangga dan siap menjadi seorang suami dan ayah yang baik;

Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** (calon istri anak Pemohon) yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** saat ini telah berumur 17 tahun;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** karena sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 bulan, dan pernah melakukan hubungan badan sehingga saat ini tengah hamil;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON** karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah siap untuk berumah tangga dan siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;



Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **IBU KANDUNG CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sebagai ibu kandung dari **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** mengetahui anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** sudah cukup lama dan keduanya saat ini sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga **ANAK PEMOHON** telah datang melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK 7316043112580004, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** No.7316041608021503, tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-339/Kua.21.05.02/Pw.01/11/2018 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, tanggal 12 Nopember 2018, bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**;



- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** baru 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah berhubungan cukup serius sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** telah melamar calon istrinya tersebut dan telah diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi bersedia dan siap membantu dan membimbing **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dalam menjalani rumah tangga apabila keduanya telah dinikahkan;
- 2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan mengetahui Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** baru berumur 16 tahun;



- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** belum lama berhubungan namun keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu keluarga **ANAK PEMOHON** telah datang melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan keluarga dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama menolaknya dengan alasan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) serta ibu kandung dari **CALON ISTRI ANAK PEMOHON (IBU KANDUNG CALON ISTRI ANAK PEMOHON)** yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** saat ini baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat, sehingga secara formil dan materil alat bukti P.3 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, **ANAK PEMOHON** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** sebagaimana tersebut dalam bukti P.3, maka secara hukum, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** baru berumur 16 tahun. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah lama saling kenal dan mencintai. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan nasab dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tidak pernah sesusuan serta **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon. Bahwa kedua saksi siap membantu dan



membimbing anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini baru berumur 16 tahun, namun sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani;
3. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** telah berhubungan begitu dekat dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan keduanya sepakat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa pihak keluarga **ANAK PEMOHON** telah melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tidak pernah sesusuan, dan anak Pemohon tersebut telah siap menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sepakat untuk segera menikah sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjerumusnya anak Pemohon beserta calon istrinya dalam kemaksiatan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, **ANAK PEMOHON** meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** baru berumur 16 tahun, harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan dan kemaksiatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Rasulullah S.AW. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من
استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W
bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian
mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena
sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan
pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan
barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena
sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi
dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, **ANAK
PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada larangan untuk
menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**
yang baru berumur 16 tahun, sehingga permohonan Pemohon agar anak
Pemohon, **ANAK PEMOHON** diberikan dispensasi untuk menikah dengan
calon istrinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag.,M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 110.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Jumlah Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Ek